Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Merehabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkotika

Performance Effectiveness of Primary Clinics of the National Narcotics Agency of the Province of North Sumatra in Rehabilitation of Narcotics Addiction Outpatients

Ela Dwi Tika¹⁾, Syafruddin Ritonga²⁾ & Rosmala Dewi^{1)*}

1) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Mei 2019; Disetujui: Mei 2019; Diterbitkan: Juni 2019.

Abstrak

Efektifitas merupakan tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya, sedangkan kinerja merupakan hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara berfungsi untuk membantu pemulihan penyalahgunaan ataupun pecandu narkotika dengan cara rehabilitasi rawat jalan dengan melibatkan dokter serta perawat terlatih, SOP yang dilakukan adalah asesmen oleh tim medis guna mengetahui derajat keparahan dan rencana terapi rehabilitasi bagi klien. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus kepada efektivitas kinerja klinik pratama dalam merehabilitasi rawat jalan bagi pecandu narkotika. Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di jalan Willem Iskandar Pasar V Barat No. 1A Medan Estate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai di klinik pratama dikatakan cukup efektif dikarenakan oleh hambatan-hambatan. Faktor-faktor yang berperan dalam mencapai efektivitas di klinik pratama adalah Pencapaian target, penyesuaian diri, kepuasan kerja dan Tanggung Jawab. Hambatan-hambatan yang ada berupa anggaran yang minim, kurangnya tenaga medis dan kurangnya sarana prasana.

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Rawat Jalan Pecandu Narkotika.

Abstract

Effectiveness is the degree to which a social system reaches its goal. While performance is a result of a whole during a certain period in carrying out his duties. The National Narcotics Agency Sumatra Province serves to assist the recovery of narcotics addicts or abuse by means of outpatient rehabilitation. As for the outpatient rehabilitation involves teams of doctors and nurses trained, Standard Operational Procedure that is conducted by a team of medical assesment service is to know the degree of severity and therapeutic rehabilitation plan for the client. This type of research is qualitative research methods focusing to clinical performance effectiveness pratama in outpatient rehabilitation for addicts of narcotic drugs. The nature of this research is descriptive. The location of the research carried out in the way of West V William Iskandar Market Numbers.1A Field Estate. The results showed that the performance of the employees Klinik Pratama is said to be quite effective due to obstacles. Factors that play a role in achieving clincial effectiveness pratama is the achievement of targets, adaptability, job satisfaction, and responsibility. The existing barriers in the form of skimpy budgets, a lack of medical personnel and the lack of infrastructure repair facility.

Keywords: Effectivitas, Performance, Outpatient Drug Addicts.

How to Cite: Tika, E.D. Ritonga, S. & Dewi, R. (2019). Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Merehabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkotika. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 27-31.

*Corresponding author:

E-mail: eladwitika19@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali dengan pemakaian pertama, karena tawaran, bujukan dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, mereka mau menerimanya. Selanjutnya, tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya. Dari pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakan.

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat adiktif yang jika dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan. Jumlah penduduk Sumatera Utara 13.937.797 jiwa yang berada di 6.101 desa/kelurahan atau 33 kabupaten/kota, berdasarkan data dari BNN sebanyak 350 ribu jiwa sudah menjadi pengguna narkoba. Jumlah ini dapat dikatakan 10 ribu orang di setiap kabupaten/kota yang menjadi pengguna narkoba. melihat data dari hampir 14 juta jiwa penduduk Sumut. 2,5 persennya atau 350 ribu jiwa sudah menjadi pengguna narkoba dan 28.000 tahanan merupakan peredaran dan penggunaan narkoba(<https://elshint.com/news/127056/2017/11/14/data-bnnp-25-persen-warga-sumut-pengguna-narkoba> Diakses pada 14 Desember 2017).

Para pengguna narkoba itu tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dengan melaporkan diri pada Institusi Penerimaan Wajib Lapori (IPWL). Wajib lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang cukup umur atau keluarganya, orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga Independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Badan Narkotika Nasional juga

diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama internasional agar jaringan narkoba transnasional dapat dihancurkan.

Dalam menanggapi hal di atas Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang ini dikeluarkan agar masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Dalam hal mengatasi penyalahgunaan narkoba terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

Salah satu fungsi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara ialah untuk merehabilitasi pecandu narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memiliki Klinik Pratama untuk membantu pemulihan penyalahgunaan ataupun pecandu narkoba dengan cara rehabilitasi rawat jalan. Adapun tim rehabilitasi rawat jalan dengan melibatkan dokter serta perawat terlatih. Standar operasi prosedur yang dilakukan adalah asesmen oleh tim medis guna mengetahui derajat keparahan (kecanduan narkoba dan penyakit penyerta yang mungkin diderita) dan rencana terapi rehabilitasi bagi klien. Setelah dilakukan asesmen barulah penyalahguna atau pecandu narkoba tersebut menjalani rehabilitasi medis rawat jalan dengan basis simptomatis, yakni pengobatan berdasar keluhan saat itu (misalkan klien datang dengan keluhan sakit kepala maka resep yang diberikan adalah pereda nyeri sakit kepala), dan dilanjutkan dengan konseling.

Tujuan dari konseling adalah untuk memantapkan klien agar mampu lepas dari jerat adiksi narkoba dan tidak kambuh kembali. Adapun pola rehabilitasi rawat jalan yang dilaksanakan oleh BNNP Sumatera Utara ialah pertemuan selama 8 kali proses tatap muka (terdiri dari 4 (empat) kali konsultasi secara group, 2 (dua) kali melaksanakan seminar pengembangan diri, 1 (kali) konsultasi bersama pihak keluarga dengan BNNP Sumut dan 1 (kali) konsultasi secara

pribadi sengan konselor yang ada di BNNP Sumut.

Kinerja rehabilitasi tersebut sangatlah penting. Dikarenakan para orang yang memakai narkoba secara ilegal akan menyebabkan kerusakan pada saraf-saraf otaknya. Dapat dilihat efek secara umum dari penyalahgunaan narkoba menyebabkan halusinasi, menekan sistem syaraf pusat, mengurangi aktifitas tubuh dan cenderung bersifat pasif. Apabila kinerja dalam rehabilitasi tersebut tidak dilakukan maka dapat menyebabkan generasi muda Indonesia yang telah terjerumus ke belenggu narkoba tidak akan pulih lagi yang menyebabkan masa depan mereka akan suram. Pada hakikatnya Badan Narkotika Nasional memiliki tugas dan fungsi sebagai pencegah penyalahgunaan terhadap narkoba, pemberantasan peredaran gelap narkoba, dan rehabilitasi bagi para penyalahgunaan narkoba. Tindakan pemberantasan tersebut harus dapat berjalan secara sinergi dan saling berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Maka untuk memudahkan penjelasan mengenai kriteria atau indikator dari pada efektivitas menurut Tangkilisan (2005) terdapat empat indikator yang biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas yaitu: Pencapaian Target, Kemampuan Adaptasi, Kepuasan Kerja, Tanggung Jawab,

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Pasar V Barat No. 1A Medan Estate. Sumber data yang menjadi fokus penelitian terdiri dari: Sumber data primer yang berupa hasil dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip dan kepustakaan.

Menurut Setiawan (dalam Mardalis, 2009) mengatakan bahwa *purposive sampling*, yang berarti sampel dipilih sesuai dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Untuk itu adapun yang menjadi informan pada Penelitian ini yaitu: 1) Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara; 2) Informan Utama dalam penelitian ini yaitu Kepala

Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara; 3) Informan Tambahan dalam penelitian ini yaitu Klien Rawat Jalan dan Staff Rehabilitasi Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

Dengan adanya permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat di Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Diprovinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk

BNN Kabupaten/Kota. Untuk di Provinsi Sumatera Utara, telah dibentuk BNNP yang merupakan suatu Badan Vertikal non Kementerian yang terbentuk pada tanggal 19 April 2011.

Rehabilitasi merupakan hal yang sangat efektif dalam menurunkan atau memulihkan pecandu narkoba dalam pemakaian terhadap narkoba. Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dimulai sejak tahun 2014 sampai sekarang masih berupa rehabilitasi rawat jalan bagi pecandu narkoba dan sebagai perantara untuk mengirim pecandu lembaga rehabilitasi milik pemerintah (milik BNN RI) atau lembaga rehabilitasi ketergantungan obat milik swasta.

Tahapan yang Dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

Tahapan yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan atau melaporkan diri untuk direhabilitasi

Para pelapor atau orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik itu merupakan hasil dari proses tangkap tangan ataupun melaporkan dirinya sendiri terlebih dahulu akan di tes urine, dan jika terbukti positif menggunakan narkoba akan ditahan di sel klinik pratama BNNP Sumatera Utara paling lama 2 hari untuk mengetahui seberapa besar kadar pemakaian dan ketergantungannya akan narkoba.

2. Proses interogasi dan asament

Dalam tahapan ini pihak BNNP Sumatera Utara akan memanggil orangtua dari sipemakai narkoba tersebut untuk menjelaskan program apa yang harus dilaksanakan untuk merehabilitasi si pecandu tersebut baik itu melalui proses rehabilitasi rawat jalan yang ada di klinik Pratama.

3. Proses penetapan rehabilitasi yang tepat bagi pecandu narkoba

Dalam proses ini pihak BNNP Sumatera Utara menentukan program apa yang tepat dilaksanakan untuk memulihkan kecanduan narkoba, baik itu rawat jalan atau rawat inap ditentukan berdasarkan berapa lama sipecandu menggunakan narkoba tersebut.

Untuk melihat efektivitas kinerja klinik pratama Badan Narkotika Nasional dalam

merehabilitasi rawat jalan pecandu narkoba menurut Tangkilisan (2005) terdapat empat indikator yang biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas.

4. Pencapaian Target

Berdasarkan penjelasan narasumber yang diperoleh menjelaskan bahwa Pencapaian target dalam merehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama harus tercapai dan apabila tidak tercapai berarti kinerjanya tidak maksimal. Kinerja para pegawai klinik Pratama bisa dikatakan cukup efektif karena ke efektivitasan dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja.

5. Kemampuan Adaptasi

Berdasarkan keterangan narasumber diatas menjelaskan bahwa penyesuaian diri memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja pegawai karena dapat memberikan sumbangan efektif terhadap peningkatan kinerja pegawai. Penyesuaian diri para residen juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena jika residen dapat menyesuaikan dirinya maka akan mudah untuk mengikuti prosedur yang berlaku sehingga para pegawai akan terlihat bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

6. Kepuasan Kerja

Dapat ditarik kesimpulan dari keterangan informan diatas sebagai residen rawat jalan menyatakan bahwa kinerja para pegawai cukup memuaskan sudah sesuai prosedur yang berlaku dan sudah menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan adanya kepuasan para residen terhadap kinerja para pegawai akan mencapai efektivitas organisasi.

7. Tanggung Jawab

Berdasarkan keterangan narasumber diatas menjelaskan bahwa para pegawai sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing hanya saja masih jauh dari kata sempurna, namun masih bekerja sesuai prosedur. Dan narasumber menjelaskan pola rehabilitasi rawat jalan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara ialah pertemuan selama 8 kali proses tatap muka (terdiri dari 4 kali konsultasi secara group, 2 kali melaksanakan seminar pengembangan diri, 1 kali konsultasi bersama pihak keluarga dengan BNNP Sumatera Utara dan 1 kali konsultasi secara pribadi dengan konselor yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut.

SIMPULAN

Efektifitas kinerja Klinik Pratama dalam merehabilitasi rawat jalan pecandu narkoba dapat dikatakan cukup efektif. Karena dalam pencapaian target sudah dapat tercapai sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan dalam pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan yang wajib membuat hasil perkembangan residen secara tertulis. Tetapi masih adanya hambatan-hambatan anggaran yang masih minim, seperti kurangnya tenaga medis atau konselor, kurangnya kemampuan adaptasi karena penyesuaian diri dari residen sedikit terhambat yang seharusnya lebih terbuka dan mengikuti prosedur yang berlakuserta kepuasan kerja yang dirasakan para pegawai atau konselor belum merasa puas karena kurangnya sarana prasarana seperti tidak adanya dana insentif yang diberikan perusahaan kepada pegawai ataupun konselor.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, T. (2012). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Data Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmad, J. (2015). Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.
- Dunn, N.W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Nur'aini, F.D.F. (2017). Panduan Praktis Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Quadrant.
- Iskandar, A. (2008). Jalan lurus Penanganan Penyalahguna Narkoba Dalam Kontstruksi Hukum Positif. CV. Viva Tanpa. Karawang.
- Kurniawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Mardalis. (2009). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martono, L.H. & Joewana, S. (2010). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pasolong, H. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H.N.S. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo
- Tika, P. (2008). Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. (2014). Manajemen Kinerja Ed Revisi-4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijayanti, D. (2016). Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba. Yogyakarta: Bantul.
- Zulkarnain. (2014). Memilih Lingkungan Bebas Narkoba Panduan untuk Remaja. Bandung: Perdana Mulya Sarana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Fitriani. (2014). Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura "Pusat Rehabilitasi Narkoba Kalimantan Barat". Universitas TanjungPura. Vol.2. No.1. Diakses Pada 13 November 2017 Pada Pukul 10.00 WIB.
- Musdalifah. (2015). "Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional (BNN) Tanak Merah dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba di Kota Samarinda" Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2, 2015: 718-730. Diakses pada 11 November 2017 Pada Pukul 13.00 WIB.
- Sitepu, P.A. (2016). Badan Narkoba Nasional Dalam Upaya Merehabilitasi Pecandu Narkoba. Skripsi. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Medan. Diakses pada 11 Desember 2017 Pada Pukul 10.00 WIB.
- Taufik, M.N. (2017). Efektivitas Kinerja Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Dikalangan Pelajar Provinsi Lampung. Skripsi. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Diakses pada 4 Desember 2017 Pada Pukul 15.00 WIB.
- <https://elshinta.com/news/127056/2017/11/14/data-bnnp-25-persen-warga-sumut-pengguna-narkoba> Diakses pada 14 November 2017 Pada Pukul 10.00 WIB.